



Dr. Sukirman, S.S., M.Pd.

KONSEP DASAR PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA



Editor: Dr. Salam, M.Pd.

Dr. Sukirman, S.S., M.Pd.

KONSEP DASAR BAHASA INDONESIA

Editor: Dr. Salam, M.Pd.



**KONSEP PEMBELAJARAN DASAR BAHASA
INDONESIA**

@2022. Dr. Sukirman, S.S., M.Pd.

vi + 118 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-8008-05-6

Cetakan Pertama, September 2022

Penulis : Dr. Sukirman, S.S., M.Pd.

Editor : Dr. Salam, M.Pd.

Tata Letak Isi : Nurul Aswar, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Ahmad Hanin Latif

Diterbitkan oleh:

MATA KATA INSPIRASI

(Anggota IKAPI No. 146/DIY/2021)

Gampingan RT 003, Dusun Munggang,

Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul

Email: matakatainspirasi@gmail.com

www.cetakbukumurah.id

KATA PENGANTAR

Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa sebagai instrumen pengembangan kepribadian mahasiswa menuju terbentuknya masyarakat terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia baik secara tertulis maupun secara lisan.

Mahasiswa perlu ditingkatkan kesadarannya bahwa bahasa Indonesia adalah alat komunikasi paling penting untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini mengingat bahasa Indonesia merupakan alat mengungkapkan diri baik secara lisan maupun tertulis, dari segi rasa, karsa, dan cipta, serta pikir, baik secara etis, estetis, maupun secara logis. Warga negara Indonesia yang mahir berbahasa Indonesia yang akan dapat menjadi warga negara yang mampu memenuhi kewajibannya di mana pun mereka berada di wilayah tanah air dan dengan siapa pun mereka bergaul di wilayah NKRI. Oleh karena itu, bahasa Indonesia masuk ke dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian mahasiswa, yang kelak sebagai insan terpelajar akan terjun ke dalam kancah kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pemimpin dalam lingkungannya masing-masing.

Buku ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi emas Indonesia.

Palopo, September 2022
Penyusun

Dr. Sukirman, S.S., M.Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA.....	1
A. Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia.....	1
B. Peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan Perkembangan Bahasa Indonesia.....	5
C. Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia	13
BAB II BAHASA INDONESIA RAGAM ILMIAH	18
A. Pengertian dan Karakteristik Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah	18
B. Berbagai Ragam Bahasa.....	19
C. Menggunakan Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah dalam Menulis dan Presentasi Ilmiah	21
BAB III DIKSI (PILIHAN KATA)	22
A. Kaidah Makna	22
B. Penggunaan Pilihan Kata (Diksi)	29
BAB IV PEMBENTUKAN DAN PERLUASAN KALIMAT	33
A. Pendahuluan	33
B. Pengertian Kalimat	33
C. Bagian-Bagian Kalimat	35
D. Kalimat Tunggal	36
E. Kalimat Majemuk Setara	37
F. Kalimat Majemuk Bertingkat	39
G. Jenis Konjungsi	42
BAB V PEMBENTUKAN PARAGRAF	44
A. Pendahuluan	44
B. Pengertian Paragraf	44
C. Struktur Paragraf	45
D. Tujuan Pembentukan Paragraf	46
E. Jenis-jenis Paragraf	47

F. Syarat Pembentukan Paragraf	48
G. Teknik Pengembangan Paragraf	51
H. Cara Penempatan Pikiran Utama	52
I. Pola Pengembangan Paragraf	58
BAB VI KETERAMPILAN MEMBACA	64
A. Teknik Membaca SQ3R	64
B. Teknik Membaca <i>skimming</i> dan <i>scanning</i>	69
C. Usaha dan Potensi Membaca	70
D. Membaca Tulisan Ilmiah	72
BAB VIII KETERAMPILAN MENULIS	76
A. Menulis Surat	76
B. Menulis Makalah	87
C. Karya Reproduksi Bacaan	93
BAB IX KETERAMPILAN BERBICARA	101
A. Presentasi	101
B. Seminar	106
C. Berpidato dalam Situasi Formal	107
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA

A. Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia

Bahasa Melayu adalah bahasa kebanggaan *Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura*. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi negara Republik Indonesia merupakan sebuah dialek bahasa Melayu, yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau (bahasa Melayu di Provinsi Riau, Sumatra, Indonesia). Nama Melayu pertama digunakan sebagai nama kerajaan tua di daerah Jambi di tepi Sungai Batanghari, yang pada pertengahan abad ke-7 ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Selama empat abad kerajaan ini berkuasa di daerah Sumatra Selatan bagian timur dan dibawa pemerintahan raja-raja Syailendra bukan saja menjadi pusat politik di Asia Tenggara, melainkan juga menjadi pusat ilmu pengetahuan.

Berdasarkan beberapa prasasti yang ditemukan, yaitu Kedukan Bukit (683), Talang Tuwo (684), Telaga Batu (tidak berangka tahun), Kota Kapur, Bangka (686), dan Karang Brahi(686) membuktikan bahwa kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu, yaitu yang biasa disebut Melayu Kuno, sebagai bahasa resmi dalam pemerintahannya. Dengan kata lain, prasasti-prasasti itu menunjukkan bahwa pada abad ke-7 bahasa Melayu telah digunakan sebagai

bahasa resmi di daerah kekuasaan Sriwijaya yang bukan hanya di Sumatra, melainkan juga di Jawa dengan ditemukannya prasasti Gandasuli di Jawa Tengah (832) dan didekat Bogor (942). Di Samping, sebagai bahasa resmi pemerintahan, bahasa Melayu juga sudah digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa pengantar dalam mempelajari ilmu agama dan bahasa perdagangan.

Sekitar awal abad ke-15 kerajaan Malaka di Semenanjung berkembang dengan sangat cepat menjadi pusat perdagangan dan pusat pertemuan para pedagang dari Indonesia, Tiongkok, dan dari Gujarat. Para pedagang dari Jawa pada waktu itu dikuasai oleh Majapahit membawa rempah-rempah, cengkih, dan pala dari Indonesia Timur ke Malaka. Hasil Bumi di Sumatra yang berupa Kapur barus, lada kayu cendana, dan yang lainnya dibawa ke Malaka oleh para pedagang dari Sumatra. Di Malaka mereka membeli barang-barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang dari Tiongkok dan Gujarat berupa sutera dari India, kain pelikat dari Koromandel, minyak wangi dari Persia, kain dari Arab, kain sutera dari Cina, kain bersulam emas dari Tiongkok, kain satin, kipas dari Tiongkok, dan barang-barang perhiasan yang lain.

Letak kota pelabuhan Malaka sangat menguntungkan bagi lalu lintas dagang melalui laut dalam abad ke-14 dan 15. Semua kapal dari Tiongkok dan Indonesia yang akan berlayar ke barat melalui Selat Malaka. Demikian pula semua kapal dari negara-negara yang terletak di sebelah barat Malaka apabila berlayar ke Tiongkok atau ke Indonesia juga melalui Selat Malaka, sebab pada saat itu, Malaka adalah satu-satunya kota pelabuhan di selat Malaka. Oleh karena itu, Malaka menguasai perdagangan antara negara-negara yang terletak di daerah utara, barat, dan timurnya.

Perkembangan Malaka yang sangat cepat berdampak positif terhadap bahasa Melayu. Sejalan dengan lalu lintas perdagangan, bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga penyiaran agama Islam dengan cepat tersebar ke seluruh Indonesia, dari Sumatra sampai ke kawasan timur Indonesia.

Perkembangan Malaka sangat cepat, tetapi hanya sebentar karena pada tahun 1511 Malaka ditaklukkan oleh angkatan laut Portugis dan pada tahun 1641 ditaklukkan pula oleh Belanda. Dengan kata lain, Belanda telah menguasai hampir seluruh Nusantara.

Belanda, seperti halnya negara asing yang lain sangat tertarik dengan rempah-rempah Indonesia. Mereka tidak puas kalau hanya menerima rempah-

rempah dari pedagang Gujarat. Oleh karena itu, mereka datang sendiri ke daerah-daerah rempah itu. Pada tahun 1596 datanglah pedagang Belanda ke daerah Banten di bawah nama VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Tujuan utama mereka adalah untuk berdagang, tetapi sejak tahun 1799 diambil alih oleh pemerintah Belanda. Dengan demikian, tujuannya bukan hanya untuk berdagang, melainkan juga untuk tujuan sosial dan pendidikan.

Masalah yang segera dihadapi oleh Belanda adalah masalah bahasa pengantar. Tidak ada pilihan lain kecuali bahasa Melayu yang dapat digunakan sebagai bahasa pengantar karena pada saat itu bahasa Melayu secara luas sudah digunakan sebagai *lingua franca* di seluruh Nusantara. Pada tahun 1521 Pigafetta yang mengikuti pelayaran Magelhaens mengelilingi dunia, ketika kapalnya berlabuh di Todore menuliskan kata-kata Melayu. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Melayu yang berasal dari Indonesia sebelah barat itu telah tersebar luas sampai ke daerah Indonesia sebelah Timur.

Dari hari ke hari kedudukan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* semakin kuat, terutama dengan tumbuhnya rasa persatuan dan kebangsaan di kalangan pemuda pada awal abad ke-20 sekalipun mendapat rintangan dari pemerintah dan segolongan orang Belanda yang berusaha keras menghalangi perkembangan bahasa Melayu dan berusaha menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional di Indonesia. Para pemuda yang bergabung dalam berbagai organisasi, para cerdik pandai bangsa Indonesia berusaha keras mempersatukan rakyat. Mereka sadar bahwa hanya dengan persatuan seluruh rakyat bangsa Indonesia dapat menghalau kekuasaan kaum penjajah dari bumi Indonesia dan mereka sadar juga hanya dengan bahasa Melayu mereka dapat berkomunikasi dengan rakyat. Usaha mereka mempersatukan rakyat, terutama para pemudanya memuncak pada *Kongres Pemuda* di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kongres itu para pemuda dari berbagai organisasi pemuda mengucapkan ikrar mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia; mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia; dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Demikianlah, tanggal 28 Oktober merupakan hari yang amat penting, merupakan hari pengangkatan atau penobatan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau sebagai bahasa nasional. Pengakuan dan pernyataan yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 itu tidak akan ada artinya tanpa diikuti usaha untuk mengembangkan bahasa Indonesia, meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai realisasi usaha

itu, pada tahun 1939 para cendekiawan dan budayawan Indonesia menyelenggarakan suatu kongres, yaitu Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, Jawa Tengah. Dalam Kongres itu Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa *“jangan dinamakan ‘Bahasa Indonesia’ jaitoe bahasa Melajoe jang soenggoehpoen pokoknja berasal dari ‘Melajoe Riaoe’, akan tetapi jang soedah ditambah, dioebah ataoe dikoerangi menoeroet keperluan zaman dan alam baharoe, hingga bahasa itoe laloe moedah dipakai oleh rakyat di seloeroeh Indonesia;”*. Oleh karena itu, kongres pertama ini memutuskan bahwa buku-buku tata bahasa yang sudah ada tidak memuaskan lagi, tidak sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia sehingga perlu disusun tata bahasa baru yang sesuai dengan perkembangan bahasa.

Hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942 tidak satu keputusan pun yang telah dilaksanakan karena pemerintahan Belanda tidak merasa perlu melaksanakan keputusan itu. Setelah masa pendudukan Jepang Bahasa Indonesia memperoleh kesempatan berkembang karena pemerintah Jepang, seperti halnya pemerintah penjajah yang lain sesungguhnya bercita-cita menjadikan bahasa Jepang menjadi bahasa resmi di Indonesia terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Perkembangan berjalan dengan sangat cepat sehingga pada waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah siap menerima kedudukan sebagai bahasa negara, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36.

Setelah Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 bahasa Indonesia semakin mantap kedudukannya. Perkembangannya juga cukup pesat. Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus ditetapkan Undang-undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal, yaitu pasal 36, yang menyatakan bahwa “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa negara juga, bahasa Indonesia dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara.

Sesudah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. setiap tahun jumlah pemakai bahasa Indonesia bertambah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara juga semakin kuat. Perhatian terhadap bahasa Indonesia baik di pemerintah maupun masyarakat sangat besar. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia di

antaranya melalui pembentukan lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang sekarang menjadi Pusat Bahasa dan Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Perubahan ejaan bahasa Indonesia dari Ejaan van Ophuijsen ke Ejaan Soewandi hingga Ejaan yang Disempurnakan selalu mendapat tanggapan dari masyarakat.

Dalam era globalisasi sekarang ini, bahasa Indonesia mendapat saingan berat dari bahasa Inggris karena semakin banyak orang Indonesia yang belajar dan menguasai bahasa Inggris. Hal ini, tentu saja merupakan hal yang positif dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi. Akan tetapi, ada gejala semakin mengecilnya perhatian orang terhadap bahasa Indonesia. Tampaknya orang lebih bangga memakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai juga banyak dicampur dengan bahasa Inggris. Kekurangpedulian terhadap bahasa Indonesia akan menjadi tantangan yang berat dalam pengembangan bahasa Indonesia.

Pada awal tahun 2004, Dewan Bahasa dan Pustaka (Malaysia) dan Majelis Bahasa Brunai Darussalam - Indonesia - Malaysia (MABBIM) mencanangkan Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN dengan memandang lebih separuh jumlah penduduk ASEAN mampu bertutur dalam bahasa Melayu. Walaupun demikian, gagasan ini masih dalam perbincangan.

Melalui perjalanan sejarah yang panjang bahasa Indonesia telah mencapai perkembangan yang luar biasa, baik dari segi jumlah penggunaannya, maupun dari segi sistem tata bahasa dan kosakata serta maknanya. Sekarang bahasa Indonesia telah menjadi bahasa besar yang digunakan dan dipelajari tidak hanya di seluruh Indonesia tetapi juga di banyak negara bahkan kebersihan Indonesia dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada generasi muda telah dicatat sebagai prestasi dari segi peningkatan komunikasi antarwarga negara Indonesia.

B. Peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia

1. Kelahiran Bahasa Indonesia Secara Politis

Bahasa Melayu yang semakin lama semakin kaya dengan adanya pengaruh bahasa-bahasa lain tersebut sampai dengan menjelang akhir tahun 1928 secara resmi masih tetap bernama bahasa Melayu, walaupun dilihat dari segi fungsinya sudah tidak lagi mencerminkan sebagai bahasa daerah. Atas kesadaran para pemuda (yang tergabung dalam berbagai organisasi pemuda

saat itu) akan pentingnya bahasa sebagai alat pemersatu bangsa, maka pada Kongres Pemuda di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928 dicetuskan dalam ikrar politik yang disebut dengan nama Sumpah Pemuda. Bunyi ikrar tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa yang satoe bangsa Indonesia;
- 2) Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertanah air yang satu tanah air Indonesia;
- 3) Kami poetera dan poeteri Indonesia, menjoenjoeng bahasa persatoean bahasa Indonesia.

Sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda tersebut berarti secara resmi bahasa Indonesia telah lahir. Namun demikian, karena kelahiran itu terwujud dalam rangka ikrar politis, maka kelahiran tersebut juga disebut kelahiran politis. Secara formal pemerintah yang berkuasa saat itu (Pemerintah Hindia Belanda) tetap menyatakan bahwa bahasa yang dipakai oleh pribumi (sebutan orang Indonesia pada saat itu) adalah bahasa Melayu.

Walaupun pemerintah Hindia Belanda belum mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan bagi rakyat Indonesia, namun dampaknya semakin terasa. Dampak tersebut berupa semakin menggebunya semangat persatuan para pemuda. Persatuan tersebut disadari sepenuhnya sebagai modal dasar untuk mengusir penjajah.

2. Kelahiran Bahasa Indonesia Secara Yuridis

Upaya para pemuda untuk mengusir penjajah dengan modal dasar semangat persatuan tersebut akhirnya membuahkan hasil berupa Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta (atas nama bangsa Indonesia) pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, yakni tanggal 18 Agustus 1945 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) diundangkan. Salah satu dari pasal-pasal yang terdapat pada UUD 1945 tersebut, yakni Bab XV Pasal 36 berbunyi: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Dengan demikian, berarti bahasa Indonesia secara resmi, secara yuridis, telah dinyatakan sebagai bahasa Negara atau bahasa Resmi.

Tahun-tahun penting yang mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu/Indonesia dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Ch. A. van Ophuijsen dan dimuat dalam *Kitab Logat Melayu*.
2. Pada tahun 1908 pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama *Commissie voor de Volkslectur* (Taman Bacaan Rakyat), yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi *Balai Pustaka*. Balai Pustaka menerbitkan buku-buku novel, seperti *Siti Nurbaya* dan *Salah Asuhan* dan buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas.
3. Tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat-saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia karena pada tanggal itulah para pemuda pilihan memancarkan tonggak yang kokoh untuk perjalanan bahasa Indonesia.
4. Pada tahun 1933 resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya *Pujangga Baru* yang dipimpin oleh Sutan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawan.
5. Pada tanggal 25 – 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres di Solo ini dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita saat itu.
6. Masa pendudukan Jepang (1942-1945) merupakan pula suatu masa penting. Jepang memilih bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi antara pemerintah Jepang dengan rakyat Indonesia karena niat menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda untuk alat komunikasi tidak terlaksana. Bahasa Indonesia juga dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan dan untuk keperluan ilmu pengetahuan.
7. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu pasalnya (Pasal 36) menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
8. Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan Ejaan Republik (Ejaan Soewandi) sebagai pengganti Ejaan van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya.
9. Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober – 2 November 1954 adalah juga salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia

untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara.

10. Pada tanggal 16 Agustus 1972 Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972.
11. Tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* resmi berlaku di seluruh Indonesia.
12. Kongres Bahasa Indonesia III yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober – 2 November 1978 merupakan peristiwa yang penting bagi kehidupan bahasa Indonesia. Kongres yang diadakan dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda yang kelima puluh ini, selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
13. Kongres bahasa Indonesia IV diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 – 26 November 1983. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang mewajibkan kepada semua warga Negara Indonesia dengan baik dan benar, dapat tercapai semaksimal mungkin. Selain itu, kongres menugasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk memantau hasil-hasil kongres sebelumnya kepada kongres berikutnya.
14. Kongres Bahasa Indonesia V juga diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober – 3 November 1988. Kongres ini merupakan kongres yang terbesar dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia karena selain dihadiri oleh kira-kira tujuh ratus pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara, juga kongres ini diikuti oleh peserta tamu dari Negara sahabat, seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres ke-5 ini dibuka oleh Presiden Soeharto di Istana Negara Jakarta. Kongres ini ditandai dengan dipersembhkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada seluruh pencinta bahasa di Nusantara, yakni berupa (1) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2)

Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan (3) buku-buku bahan penyuluhan bahasa Indonesia.

15. Kongres Bahasa Indonesia VI diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober – 2 November 1993. Dalam kongres ini diselenggarakan pula pameran buku yang menyajikan 385 judul buku yang terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan kongres bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda, Bahasa dan Sastra Indonesia, serta kamus berbagai bidang ilmu, antara lain Kimia, Matematika, Fisika, Biologi, Kedokteran, dan Manajemen. Selain itu, disajikan pula panel Sumpah Pemuda, foto kegiatan kebahasaan/kesastraan, dan peragaan komputer sebagai pengolah data kebahasaan.
16. Kongres Bahasa Indonesia VII diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 – 30 Oktober 1998. Kongres ini melanjutkan program kegiatan dari kongres VI.
17. Kongres Bahasa Indonesia VIII diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 – 17 Oktober 2003. Kongres ini merupakan kongres yang terbesar dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia karena selain dihadiri oleh kira-kira seribu pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara, juga kongres ini diikuti oleh peserta tamu dari hampir seluruh negara. Di samping itu, dalam kongres ini dianugerahkan penghargaan bagi pejabat yang selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
18. Kongres bahasa Indonesia tahun 2008
Dalam rangka peringatan 100 tahun kebangkitan nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa, pada tahun 2008 dicanangkan sebagai Tahun Bahasa 2008. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2008 telah diadakan kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan. Sebagai puncak dari seluruh kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan serta peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda, diadakan Kongres IX Bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober-1 November 2008 di Jakarta. Kongres tersebut membahas lima hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional dengan menghadirkan para pembicara dari dalam dan luar negeri. Para pakar bahasa dan sastra yang selama ini telah melakukan penelitian dan mengembangkan bahasa Indonesia di luar negeri sudah sepantasnya

diberi kesempatan untuk memaparkan pandangannya dalam kongres tahun ini.

19. Kongres bahasa Indonesia tahun 2013

Kongres yang berlangsung 28-31 Oktober 2013 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta diikuti oleh 1.168 peserta dari seluruh Indonesia, dan dari luar negeri antara lain dari Jepang, Rusia, Pakistan, Jerman, Belgia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, China, Italia, dan Timor Leste. KBI X merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemerintah perlu memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia melalui penerjemahan dan penerbitan, baik nasional maupun internasional, untuk mengejawantahkan konsep-konsep ipteks berbahasa Indonesia guna menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu berperan lebih aktif melakukan penelitian, diskusi, penataran, penyegaran, simulasi, dan pendampingan dalam implementasi Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.
- 3) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) perlu bekerja sama dalam upaya meningkatkan mutu pemakaian bahasa dalam buku materi pelajaran.
- 4) Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia untuk kepentingan pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka memperkuat jati diri dan membangkitkan semangat kebangsaan.
- 5) Pembelajaran bahasa Indonesia perlu dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter untuk menaikkan martabat dan harkat bangsa.
- 6) Pemerintah perlu memfasilitasi studi kewilayahan yang berhubungan dengan sejarah, persebaran, dan pengelompokan bahasa dan sastra untuk memperkuat NKRI.
- 7) Pemerintah perlu menerapkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk menyeleksi dan mempromosikan pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, guna memperkuat jati diri dan kedaulatan NKRI, serta memberlakukan UKBI sebagai “paspor bahasa” bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

- 8) Pemerintah perlu menyiapkan formasi dan menempatkan tenaga fungsional penyunting dan penerjemah bahasa di lembaga pemerintahan dan swasta.
- 9) Untuk mempromosikan jati diri dan kedaulatan NKRI dalam rangka misi perdamaian dunia, Pemerintah perlu memperkuat fungsi Pusat Layanan Bahasa (National Language Center) yang berada di bawah tanggung jawab Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- 10) Kualitas dan kuantitas kerja sama dengan berbagai pihak luar negeri untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan, baik di tingkat komunitas ASEAN maupun dunia internasional, dengan dukungan sumber daya yang maksimal.
- 11) Pemerintah perlu melakukan “diplomasi total” untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.
- 12) Presiden/wakil presiden dan pejabat negara perlu melaksanakan secara konsekuen Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.
- 13) Perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.
- 14) Pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi kebijakan penggunaan bahasa dan pemanfaatan sastra untuk mendukung berbagai bentuk industri kreatif.
- 15) Pemerintah perlu lebih meningkatkan kerja sama dengan komunitas-komunitas sastra dalam membuat model pengembangan industri kreatif berbasis tradisi lisan, program penulisan kreatif, dan penerbitan buku sastra yang dapat diapresiasi siswa dan peminat sastra lainnya.
- 16) Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informatika dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.

- 17) Pelindungan bahasa-bahasa daerah dari ancaman kepunahan perlu dipayungi dengan produk hukum di tingkat pemerintah daerah secara menyeluruh.
- 18) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan perencanaan dan penetapan korpus bahasa daerah untuk kepentingan pemerdayaan dan peningkatan daya ungkap bahasa Indonesia sebagai bahasa penjaga kemajemukan Indonesia dan pilar penting NKRI.
- 19) Pemerintah perlu memperkuat peran bahasa daerah pada jalur pendidikan formal melalui penyediaan kurikulum yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan faktual daerah dan pada jalur pendidikan nonformal/informal melalui pembelajaran bahasa berbasis komunitas.
- 20) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan pengawasan penggunaan bahasa untuk menciptakan tertib berbahasa secara proporsional.
- 21) Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung eksistensi karya sastra, termasuk produksi dan reproduksinya, yang menyentuh identitas budaya dan kelokalannya untuk mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia.
- 22) Penggalan karya sastra harus terus digalakkan dengan dukungan dana dan kemauan politik pemerintah agar karya sastra bisa dinikmati sesuai dengan harapan masyarakat pendukungnya dan masyarakat dunia pada umumnya.
- 23) Pemerintah perlu memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada sastrawan untuk meningkatkan dan menjamin keberlangsungan daya kreativitas sastrawan sehingga sastra dan sastrawan Indonesia dapat sejajar dengan sastra dan sastrawan dunia.
- 24) Lembaga-lembaga pemerintah terkait perlu bekerja sama mengadakan lomba-lomba atau festival kesastraan, khususnya sastra tradisional, untuk memperkenalkan sastra Indonesia di luar negeri yang dilakukan secara rutin dan terjadwal, selain mendukung festival-festival kesastraan tingkat internasional yang sudah ada.
- 25) Peran media massa sebagai sarana pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia di kancah internasional perlu dioptimalkan.

- 26) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu mengingatkan dan memberikan teguran agar lembaga penyiaran menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 27) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima usulan dari masyarakat untuk menyampaikan teguran kepada lembaga penyiaran yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
- 28) Diperlukan kerja sama yang sinergis dari semua pihak, seperti pejabat negara, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, media massa, Dewan Pers, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, demi terwujudnya bahasa media massa yang logis dan santun.
- 29) Literasi pada anak, khususnya sastra anak, perlu ditingkatkan agar nilai-nilai karakter yang terdapat dalam sastra anak dipahami oleh anak.
- 30) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus memperkuat unit yang bertanggung jawab terhadap sertifikasi pengajar dan penyelenggara BIPA.
- 31) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berkoordinasi dengan para pakar pengajaran BIPA dan praktisi pengajar BIPA mengembangkan kurikulum, bahan ajar, dan silabus yang standar, termasuk bagi Komunitas ASEAN.
- 32) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memfasilitasi pertemuan rutin dengan SEAMEO *Qitep Language*, SEAMOLEC, BPKLN Kemendikbud, dan perguruan tinggi untuk menyinergikan penyelenggaraan pengajaran BIPA.
- 33) Pemerintah Indonesia harus mendukung secara moral dan material pendirian pusat studi/kajian bahasa Indonesia di luar negeri.

C. Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia

1. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya. Keempat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di atas dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak tahun 1928 sampai sekarang.

a. Bahasa Indonesia sebagai Lambang Kebanggaan Nasional

Tidak semua bangsa di dunia mempunyai sebuah bahasa nasional yang dipakai secara luas dan dijunjung tinggi. Adanya sebuah bahasa yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sanggup mengatasi perbedaan yang ada.

Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Seluruh suku bangsa di Indonesia harus memiliki rasa kebanggaan berbahasa nasional. Atas dasar kebanggaan inilah bahasa Indonesia harus dipelihara dan dikembangkan. Bangsa Indonesia sebagai pemilik bahasa Indonesia harus merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

b. Bahasa Indonesia sebagai Lambang Identitas Nasional

Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda. Untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Identitas sebuah bangsa dapat diwujudkan di antaranya melalui bahasanya. Dengan adanya sebuah bahasa yang mengatasi berbagai bahasa yang berbeda, suku-suku bangsa yang berbeda dapat mengidentifikasi diri sebagai satu bangsa melalui bahasa tersebut. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi di samping bendera dan lagu kebangsaan. Di dalam pelaksanaan fungsi ini, bahasa Indonesia harus memiliki identitasnya tersendiri yang membedakannya dengan bahasa lain.

c. Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Berbagai Suku Bangsa

Sebuah bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda dan mengalami masalah besar dalam melangsungkan kehidupannya. Perbedaan dapat memecah belah bangsa tersebut. Dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa yang ada, perpecahan ini dapat dihindari karena suku-suku bangsa tersebut merasa satu. Kalau tidak ada sebuah bahasa, seperti bahasa Indonesia, yang dapat menyatukan suku-suku bangsa yang berbeda, akan banyak muncul masalah perpecahan bangsa.

d. Bahasa Indonesia sebagai Alat Perhubungan Antar-daerah dan Antarbudaya

Masalah yang dihadapi bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan bahasa yang berbeda adalah komunikasi.

Diperlukan sebuah bahasa yang dapat dipakai oleh suku-suku bangsa yang berbeda bahasanya sehingga mereka dapat berhubungan. Bahasa Indonesia sudah lama memenuhi kebutuhan ini. Sudah berabad-abad bahasa ini menjadi *lingua franca di wilayah Indonesia*.

Bahasa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan untuk menunjukkan kepada bangsa lain tentang kekayaan nasional berupa pemilikan bahasa nasional Indonesia. Bahasa inilah yang telah berhasil menyatukan cita dan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai budaya yang berkadar nasional dikomunikasikan melalui bahasa Indonesia.

2. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di atas harus betul-betul dilaksanakan di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap petugas negara harus memperhatikan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tersebut.

a. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi Kenegaraan

Dalam kaitan dengan fungsi ini, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai pada semua upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pidato-pidato resmi, dokumen-dokumen, keputusan-keputusan, dan surat-surat resmi harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Upacara-upacara kenegaraan juga dilangsungkan dengan bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia dalam acara-acara kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 mutlak diharuskan. Tidak dipakainya bahasa Indonesia dalam hal ini dapat mengurangi kewibawaan negara karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.

Pelaksanaan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pemakaian bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi negara (pemerintah) perlu dibina dan dikembangkan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor penentu di dalam pengembangan tugas pemerintah, seperti pada penerimaan pegawai baru dan kenaikan pangkat, baik sipil maupun militer, serta pemberian tugas

khusus di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, mutu kebahasaan yang dipakai pada siaran radio, televisi, dan surat kabar perlu ditingkatkan dan dikembangkan lebih baik lagi.

b. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar dalam Dunia Pendidikan

Dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Pemakaian lebih dari satu bahasa dalam dunia pendidikan akan mengganggu keefektifan pendidikan. Biaya pendidikan menjadi lebih hemat. Peserta didik dari tempat yang berbeda dapat saling berhubungan. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang dapat memenuhi kebutuhan akan bahasa yang seragam dalam pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia telah berkembang pesat dan pemakaiannya sudah tersebar luas. Pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan tidak hanya terbatas pada bahasa pengantar, bahan-bahan ajar, tetapi juga pemakaian bahasa Indonesia. Oleh karena itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan harus dilaksanakan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

c. Bahasa Indonesia sebagai Alat Perhubungan di Tingkat Nasional untuk Kepentingan Pembangunan dan Pemerintahan

Kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional memerlukan sebuah bahasa sebagai alat perhubungan sehingga komunikasi tidak terhambat. Kalau ada lebih dari satu bahasa yang dipakai sebagai alat perhubungan, keefektifan pembangunan, dan pemerintahan akan terganggu karena akan diperlukan waktu yang lebih lama dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia dapat mengatasi hambatan tersebut.

Perkembangan bahasa Indonesia pada mulanya memang ada yang meragukan kemampuannya sebagai sarana komunikasi dan interaksi manusia Indonesia, tetapi ternyata bahasa ini mampu mengungkapkan pikiran-pikiran yang cukup rumit melalui kreativitas pengguna bahasa yang bersangkutan terutama dalam kepentingan pembangunan dan pemerintahan.

d. Bahasa Indonesia sebagai Alat Pengembangan Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.

Pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi memerlukan bahasa. Hal ini dimaksudkan agar keperluan dalam

pengembangan tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Tanpa bahasa seperti ini, pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengalami hambatan karena proses pengembangannya akan memerlukan waktu yang lama dan hasilnya pun tidak akan tersebar secara luas.

Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi karena bahasa Indonesia telah dikembangkan untuk keperluan tersebut dan bahasa ini dimengerti oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dalam kaitan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia adalah alat yang memungkinkan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan Indonesia yang memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah dan kebudayaan asing.